Reformulasi Teologi Politik NU

Kompas, Rabu 24 Maret 2010

Oleh: Masdar Hilmy

Pekan ini, Nahdlatul Ulama sedang bermuktamar di Makassar. Salah satu gugatan yang sering dilayangkan ke organisasi ini adalah soal netralitas elitenya dalam lingkaran politik kekuasaan. Secara umum, banyak kalangan menghendaki agar NU kembali pada garis khitahnya sebagai jam'iyah yang berkhidmat pada persoalan-persoalan keumatan. Selebihnya, biarlah kaum profesional yang menangani.

Faktanya, sebagian besar elite NU telah menyeret organisasi ini terlalu jauh dalam pusaran politik praktis. Sejumlah fungsionaris NU di banyak daerah telah memanfaatkan posisinya sebagai batu loncatan untuk meraih kursi kekuasaan atau sekadar terlibat dalam tarik-menarik arus kepentingan dan bagi-bagi kue kekuasaan. Sedemikian jauhnya NU terseret dalam kubangan politik praktis sehingga jurang pemisah antara NU dan warga nahdliyin semakin dalam.

Berbeda dengan kondisi NU di paruh kedua masa Orde Baru yang ditandai de- ngan maraknya program-program pemberdayaan rakyat—dan karena itu NU di- kenal sebagai pilar penting gerakan masyarakat sipil di Indonesia—NU pada masa pasca-Orde Baru lebih banyak disibukkan dengan urusan-urusan politik praktis. Sejauh ini keterlibatan sejumlah elite NU da- lam lingkaran politik praktis belum memberikan kontribusi signifikan bagi perba- ikan kondisi negara, bangsa, dan masyarakat. Sebaliknya, NU dalam posisi diru- gikan oleh petualangan mereka yang hanya memanfaatkan kebesaran nama NU.

Sebenarnya, keterlibatan elite NU dalam politik praktis merupakan hak setiap warga negara. Persoalannya, keterlibatan mereka belum mampu memunculkan nuansa baru bagi perubahan dan perbaikan negara-bangsa di segala lini. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah formulasi baru teologi politik NU yang sejalan dengan demokrasi, nilai-nilai keadaban publik, dan tatapemerintahan yang baik dan bersih. Tiga aspek inilah yang menurut saya mendesak digarap NU ke depan demi perbaikan negara-bangsa secara menyeluruh.

Politik kebangsaan

Sejatinya tidak ada yang salah dari keterlibatan sejumlah elite NU dalam pusaran politik praktis. Yang salah adalah keterlibatan tersebut justru melarutkan mereka dalam ingar-bingar dan langgam nalar politik yang korup dan amoral. Di sisi lain, nilai-nilai teologis Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) yang menjadi karakter dan identitas warga NU seolah tak berdaya menghadapi gempuran-gempuran nalar politik yang korup itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak kelahirannya, NU beserta komunitasnya memang tidak bisa dilepaskan dari nuansa politik yang menyertainya. Kelahiran NU banyak distimulasi oleh kondisi sosial-politik masyarakat pada saat itu. Kelahiran dan eksistensi NU yang sudah mampu bertahan sekian lama mencerminkan ”kemenangan” politik para kiai NU par excellence dalam konfigurasi politik yang ada. Melihat kenyataan itu, memisahkan NU atau kiai dari dunia politik ibarat memisahkan ikan dari air alias tidak mungkin.

Namun, harus dicatat, nomenklatur politik yang dimainkan NU pada saat itu bukanlah politik dalam pengertian sempit sebagaimana dipertontonkan saat ini; ”siapa mendapatkan apa”. Lebih dari itu, peran politik yang dimainkan NU adalah politik kebangsaan, kerakyatan, dan kemasyarakatan. Jumlah kepenganutan teologi Ahlussunnah wal Jama’ah—yang didaku oleh PPIM UIN Jakarta (2002)—sekitar 40 juta orang menjadi bukti berpengaruhnya NU dalam lanskap sosial-politik-keagamaan bangsa.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa NU beserta komunitasnya adalah homo politicus, zoon politicon atau ”makhluk politik” dalam pengertian luas. Pada paruh kedua masa Orde baru—tepatnya pasca-Muktamar Ke-27 NU di Situbondo, Jawa Timur, yang menegaskan khitah 1926—otoritas nonformal NU—kiai mampu menandingi otoritas formal negara-pemerintahan. Di sejumlah daerah di Jawa Timur, misalnya, ketaatan masyarakat terhadap kiai bahkan melebihi ketaatan masyarakat terhadap aparat pemerintahan.

Namun, sekarang kondisinya berbeda. Gelombang arus demokratisasi di era pasca-Orde Baru telah menyediakan ”berkah terselubung” bagi NU dan komunitasnya. Kondisi politik yang semakin terbuka membuat sebagian elite NU tergoda untuk ”bermain” di arena politik praktis. Argumentasi yang secara klise sering dikemukakan di balik keterlibatan sejumlah elite NU dalam politik praktis adalah karena panggilan nurani untuk memperbaiki moralitas bangsa. Harapannya adalah keterlibatan orang-orang NU akan mampu menerangi jagat politik dengan nilai-nilai moral Islami, seperti kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan.

Akan tetapi, bagaimana kenyataannya? Ternyata membenahi moralitas bangsa tidak semudah membalik telapak tangan. Sejumlah elite NU yang mencoba ”peruntungan” di kancah politik praktis, alih-alih mengubah moralitas bangsa yang bobrok dan korup, moralitas elite NU sendiri sering tertelan oleh ganasnya nalar politik Machievallian. Perjuangan dan kiprah politik sejumlah elite NU mengalami kekalahan demi kekalahan menyakitkan akibat tidak cukup tangguhnya daya tahan NU.

Cetak-biru

Mengapa sepak terjang dan kiprah politik elite NU sering gagal di tengah jalan? Saya menduga hal ini sangat terkait dengan belum tersedianya cetak-biru teologi politik yang memungkinkan terciptanya budaya politik baru yang bersih, akuntabel, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transparan. Pada saat NU belum memformulasikan teologi politik tersebut, sejumlah elite dan warganya beramai-ramai turun gunung di panggung politik kekuasaan yang ganas.

Keterlibatan elite NU dalam politik praktis sebenarnya bukan sesuatu yang harus diratapi sepanjang dilakukan dalam batas-batas konstitusional (sesuai AD/ ART). Terlebih lagi, keterlibatan itu didasari oleh ”amunisi teologis” yang kokoh sehingga kehadiran para politisi NU bisa memberikan makna substantif bagi perbaikan kualitas politik bangsa ke depan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa NU sudah menjadi aset bangsa dan (pernah) menjadi pilar penting masyarakat sipil di Tanah Air. Sudah semestinya kontribusi NU bagi perbaikan kualitas politik kita yang korup itu makin ditingkatkan.

Sejalan dengan itu, salah satu agenda Muktamar harus diarahkan untuk memformulasikan (kembali) teologi politik NU yang sejalan dengan pengembangan demokrasi, nilai-nilai keadaban publik, dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Perumusan teologi politik semacam itu akan jauh lebih produktif ketimbang berputar-putar pada perdebatan perlu-tidaknya warga nahdliyin berpolitik praktis. Lebih jauh, formulasi teologi politik tersebut akan mengangkat kembali citra NU yang sempat terpuruk akibat keterlibatan sebagian elite NU dalam politik praktis. Semoga.

Masdar Hilmy Warga NU; Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya; Alumnus The University of Melbourne, Australia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id